
ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PADA KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN SEMARANG BARAT

KINSELLA P. SABRINA

Progdi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: 212201703637@mhs.dinus.ac.id

Diterima: April 2021; Direvisi: Mei 2021; Dipublikasikan: Mei 2021

ABSTRACT

Business development in the economic group of small and medium enterprises greatly encourages growth and national economic development. MSME management must implement the principles or principles of good corporate governance, including: the principle of transparency, the principle of responsibility, the principle of obligation, the principle of independence as well as fairness and equality. The purpose of this study was to determine and analyze the process of implementing governance in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) group in West Semarang District. The object of this research is the Micro, Small and Medium Enterprises Group (MSMEs) in West Semarang District. The number of samples to be used in this study amounted to 100 respondents. The results showed that the process of implementing good governance in the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) group in West Semarang District had been carried out well. This can be seen from the results of the analysis of the level of governance implementation where 62% of MSMEs can implement good governance while the other 24% are still in the bad category. The Micro, Small and Medium Enterprises Group (MSMEs) in West Semarang District shows that many MSME actors have implemented good business management, especially on indicators of accountability and accountability. However, the indicators of transparency and independence from MSMEs are still weak.

Keywords: MSMEs; Governance; Business Group

ABSTRAK

Perkembangan bisnis pada kelompok ekonomi usaha kecil serta usaha menengah sangat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara nasional. Pengelolaan UMKM harus mengimplementasikan prinsip-prinsip atau asas tata kelola korporat yang baik, meliputi: asas transparan, asas pertanggungjawaban, asas kewajiban, asas independen juga kewajaran dan kesetaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penerapan tata kelola pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat. Objek penelitian adalah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat. Adapun jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan proses penerapan tata kelola pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis tingkat penerapan tata kelola dimana terdapat 62% UMKM dapat menerapkan tata kelola dengan baik sedangkan 24% lainnya masih berada pada kategori buruk. Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat menunjukkan banyak pelaku UMKM yang sudah melaksanakan pengelolaan usaha dengan baik terutama pada indikator pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Namun pada indikator transparansi dan independensi dari UMKM masih lemah.

Kata Kunci: UMKM; Tata Kelola; Kelompok Usaha

PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Usaha Mikro Kecil Menengah ini mampu menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar. UMKM sangat berperan khususnya dalam perspektif kesempatan kerja, sumber penghasilan bagi kelompok menengah kebawah, distribusi pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan (Kompas, 2019).

Perkembangan bisnis pada kelompok ekonomi usaha kecil serta usaha menengah sangat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara nasional. Sebagai wujud nyata pertumbuhan adalah dibuktikan dengan kemampuan menyerap banyak tenaga kerja dan kemampuan dalam mendistribusikan hasil-hasil usaha (Nugraheni dan Martono, 2020). Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pada sector ekonomi usaha kecil serta menengah telah membuktikan perhatian terhadap pelaku usaha tersebut dengan mengatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang klasifikasi jenis usaha bagi pelaku bisnis pada kelompok usaha kecil dan usaha menengah.

Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki warisan budaya local yang berpotensi bagus untuk dikembangkan. Semakin tahun jumlah UMKM di Kota Semarang semakin meningkat. Jumlah UMKM di Kota Semarang per tanggal 6 Maret 2021 sebanyak 17.600 UMKM, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data UMKM Kota Semarang Per-Maret 2021

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Genuk	919
2	Semarang Timur	1062
3	Semarang Tengah	1312
4	Semarang Barat	1424
5	Tugu	432
6	Gayamsari	1109
7	Semarang Utara	1683
8	Ngaliyan	656
9	Pedurungan	2818
10	Mijen	572
11	Gunungpati	586
12	Gajahmungkur	618
13	Semarang Selatan	1013
14	Candisari	696
15	Banyumanik	998
16	Tembalang	1702
	Jumlah	17600

Sumber: Daftar UMKM Kota Semarang, iumk.semarangkota.go.id

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM masih berkontribusi aktif pada pembangunan perekonomian hingga saat ini. Melihat kontribusi yang begitu besar dan kemungkinan masih dapat berkembang jumlah UMKM di Indonesia, maka pemerintah perlu memberi perhatian yang sangat besar untuk keberlangsungan UMKM. Kelompok UMKM di wilayah Semarang Barat berjumlah 1.424 menduduki peringkat ke-4 sebagai UMKM terbanyak

di Kota Semarang. Pada kelompok UMKM di wilayah Semarang Barat masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu terkait tata kelola usaha.

Permasalahan secara umum terjadi serta dihadapi oleh pelaku ekonomi usaha adalah terkait dengan keuangan dan non-keuangan (Nugraheni dan Martono, 2020). Masalah keuangan yang dihadapi antara lain akses bagi pelaku ekonomi usaha kecil terhadap ketersediaan dana masih kurang, belum tercipta suatu system untuk membantu permodalan bagi pelaku ekonomi usaha kecil serta usaha menengah, belum ada prosedur yang sederhana dalam permohonan kredit bagi pelaku ekonomi usaha kecil dan usaha menengah, sehingga berdampak pada waktu proses yang lama. Selain permasalahan di atas juga pelaku usaha pada sector kecil dan menengah menghadapi kesulitan untuk dapat mengakses pada lembaga-lembaga formal yang memberikan bantuan permodalan, sehingga mencari sumber modal yang mudah tetapi dengan bunga yang tinggi serta laporan keuangan yang dibuat pelaku ekonomi usaha kecil dan menengah masih belum sesuai dengan lembaga-lembaga keuangan yang membantu permodalan karena kurangnya pengetahuan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya permasalahan dalam pengelolaan organisasi (non-keuangan) meliputi kurangnya kesempatan bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam pelatihan dan keterampilan di bidang teknik produksi, sehingga pengetahuan yang dimiliki terkait teknik produksi serta pengendalian kualitas produksi sangat lemah demikian pula yang terkait dengan pengetahuan di bidang pemasaran, karna informasi mengenai pasar dan ketersediaan barang dan jasa yang terbatas, serta keterbatasan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, bidang keuangan dan akuntansi.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kontribusi bagi pelaku ekonomi usaha kecil dan menengah dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha agar masyarakat sejahtera, maka UMKM perlu dikelola dengan baik. Hasil yang baik akan tercermin pada peningkatan kinerja operasional perusahaan juga pengembalian modal yang lebih tinggi, yang nantinya akan berdampak pada penilaian yang baik atas perusahaan tersebut di mata investor dan investor potensial. Saputra dan Fermayani (2019) dalam risetnya menyimpulkan bahwa pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan, sehingga secara tidak langsung hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Pengelolaan UMKM tidak berbeda dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Selain itu, pada riset yang dilakukan oleh Agustina dan Santosa (2019) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berdampak pada kinerja perusahaan.

Pengelolaan UMKM harus mengimplementasikan prinsip-prinsip atau asas tata kelola korporat yang baik, meliputi: asas transparan, asas pertanggungjawaban, asas kewajiban, asas independen juga kewajaran dan kesetaraan. Prinsip penerapan asas tata kelola adalah umum atau universal. Prinsip yang tertuang dalam Komite Nasional Kebijakan Governance untuk melaksanakan tata kelola yang baik maka perlu adanya pilar yang mendukung pelaksanaannya yaitu (1) Sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi adalah negara beserta instrumennya; (2) Sebagai pelaku yang berada di pasar usaha adalah pelaku bisnis; dan (3) Sebagai pelanggan produk yang dihasilkan oleh badan usaha adalah masyarakat (Nugraheni dan Martono, 2020). Penelitian yang terkait dengan UMKM oleh Putri dan Bakhtiar (2015) memberikan penjelasan arti pentingnya menyusun laporan keuangan secara kontinu bagi usaha kecil, mikro, dan menengah yang digunakan sebagai pengendalian internal di bidang keuangan agar terbentuk proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi serta untuk pengontrolan suatu perusahaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini mengkaji tentang penerapan tata kelola pada UMKM di Kecamatan Semarang

Barat, sedang penelitian sebelumnya meneliti tentang arti pentingnya menyusun laporan keuangan bagi UMKM. Maka dari itu penulis hendak meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Penerapan Tata Kelola Pada Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Semarang Barat”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penerapan tata kelola pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat. Manfaat yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya menerapkan tata kelola pada Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) demi menunjang perkembangan perekonomian pemerintah khususnya di wilayah Kecamatan Semarang Barat.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dasar yang dipergunakan untuk memaparkan dan menyelesaikan permasalahan dalam keterkaitannya antara pelaku bisnis dan agen. Pada umumnya, keterkaitan tersebut ialah antara pemegang saham sebagai prinsipal dan eksekutif perusahaan sebagai agen. Hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih prinsipal melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang mendelegasikan otoritas pembuat keputusan untuk agen. Masalah prinsipal dan agen terjadi ketika timbul konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Perusahaan harus berusaha meminimalkan situasi ini melalui kebijakan yang kuat. Konflik kepentingan terjadi ketika suatu entitas atau individu tidak dapat diandalkan karena terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan tugas atau tanggung jawab profesional. Konflik kepentingan melekat dalam hubungan dimana satu pihak diharapkan bertindak demi kepentingan pihak lain. Keuangan perusahaan, masalah keagenan biasanya mengacu pada konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer bertindak sebagai agen untuk pemegang saham atau prinsipal, diharapkan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham meskipun manajer memiliki kepentingan terbaik untuk memaksimalkan kekayaannya sendiri.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen adalah memaksimalkan utilitas dengan minat yang berbeda dan bahwa karena adanya asimetri informasi, agen tidak akan selalu bertindak terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasi perbedaan kepentingan dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya agensi.

Permasalahan yang terjadi pada UMKM tidak terlalu nampak, sebab pada umumnya UMKM berwujud usaha keluarga dimana pemilik juga memainkan peran sebagai manajer. Dalam konteks ini akan muncul model agensi lain ketika UMKM terdapat investor yang memiliki saham minoritas akan terjadi konflik kepentingan dengan investor yang kepemilikannya mayoritas, sehingga diperlukan pelaksanaan tata kelola untuk meminimalkan konflik.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun Badan usaha di seluruh sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah

Nama Lengkap Tanpa Gelar¹ dan Nama Lengkap Tanpa Gelar² : Judul Jurnal

pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda di setiap Negara. Di negara Indonesia kriteria UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun batasan sesuai dengan UU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria UMKM

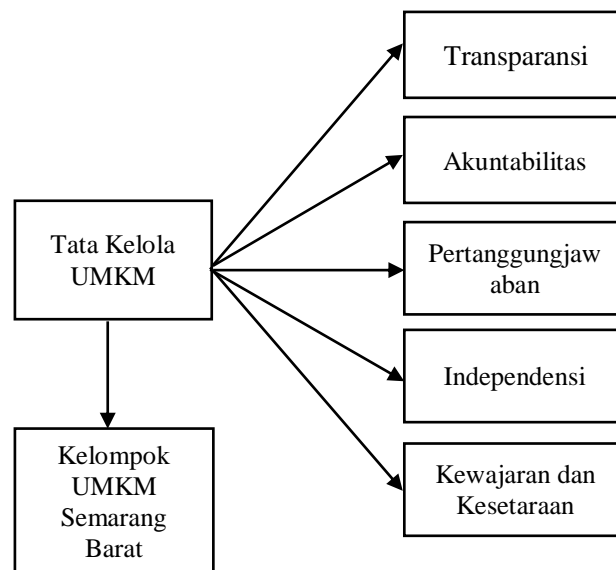
No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Penerapan Tata Kelola pada UMKM

Tata kelola merupakan suatu konsep global untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dan transparan sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Banyak manfaat yang akan didapat atas penerapan konsep tata kelola pada perusahaan. Hal ini juga memungkinkan untuk suatu UMKM mengadopsi konsep tata kelola tersebut. Dengan demikian, UMKM akan mampu mencapai usaha yang berkesinambungan. Meskipun begitu, hingga saat ini masih belum ada peraturan yang secara resmi mengatur penerapan tata kelola yang baik pada UMKM. Yuliasutik (2016) mengemukakan bahwa kondisi UMKM yang ada saat ini belum memenuhi persyaratan terlaksanakannya tata kelola yang baik. Fakta-fakta atau keadaan UMKM yang bisa disebut *trademark* UMKM seperti model pengelolaan manajemen UMKM yang mayoritas masih *one man show* atau *single fighter*, pada UMKM sendiri belum dikenal pemilahan antara aset dan kepentingan pribadi dengan bisnis, sebagian besar struktur modal UMKM masih didominasi modal sendiri terdapat kecenderungan terhadap pola pikir jangka pendek, mudah puas, dan tanpa perencanaan usaha yang matang dan terarah.

Kenyataan tentang keadaan UMKM di atas dipercaya akan dapat menghambat efektifitas penerapan konsep tata kelola pada sektor usaha kecil-menengah. Misalkan saja, konsep tata kelola menghendaki adanya suatu pemisahan fungsi dan kewenangan antara komisaris dan manajemen, karena jika tidak, akan memungkinkan terjadinya *conflic of interest* diantara kedua fungsi yang memang berbeda itu. Namun justru yang terjadi di sektor UMKM, adalah kedua fungsi dan peran tersebut sering berada dalam satu figur. Di sini, seseorang bisa menjabat sebagai direktur sekaligus pemilik perusahaan.

Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah

- Transparansi, adalah prinsip yang menjamin akses untuk memperoleh informasi tentang kebijakan proses pembuatan serta hasil keuangan dan non keuangan;
- Akuntabilitas adalah, tingkat pertanggungjawaban berkaitan dengan sistem yang dimiliki perusahaan;
- Responsibilitas adalah status tanggung jawab yang meliputi moral, hukum, kepercayaan, keandalan yang menjadi tanggung jawab seseorang;

- d. Independensi adalah, suatu keadaan atau posisi perusahaan tidak terikat pada pihak manapun atau tidak mengusung kepentingan pihak tertentu; dan
- e. Kewajaran dan kesetaraan adalah, perlakuan yang setara dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasar pada perjajjian dan peraturan.

Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan April 2021. Instansi penelitian yang digunakan adalah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat. Kelompok UMKM Semarang Barat adalah kelompok usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang ada di wilayah Semarang Barat.

Populasi dan Sampel

Responden penelitian ini adalah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *random sampling* karena populasi dalam penelitian diasumsikan homogen (mengandung satu ciri) dengan demikian sampel diambil secara acak. Cara yang dipakai sampling acak sederhana (*simple random sampling*). Beragam jenis industri produk tekstil kecil dan menengah yang bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap. Adapun jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden.

Metode Penulisan

Penulisan laporan karya ilmiah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dari beberapa penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber Data dan Jenis Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer
Data primer yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari pengelola atau pemilik dari UMKM melalui penyebaran kuisisioner secara langsung pada UMKM di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data UMKM Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang diperoleh melalui website UMKM Kota Semarang.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan langsung secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015). Informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan adalah pemilik atau pengelola UMKM di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Jenis kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner semi terbuka dengan pernyataan atau pertanyaan berkaitan dengan penerapan tata kelola pada UMKM namun responden diberikan tempat kosong untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan kondisi yang jawabannya tidak terdapat pada pilihan jawaban.

Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik

deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini penyajian data menggunakan tabel dan analisis datanya menggunakan mean.

Berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data:

- a. Menyebarkan kuesioner pada UMKM di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk memperoleh data penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data penelitian berdasarkan rata-rata pada masing-masing indikator mengenai penerapan tata kelola Kelompok UMKM.
- c. Menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh UMKM terkait dengan penerapan tata kelola.
- d. Mengolah data dan menjelaskan hasil kuesioner sesuai dengan interpretasi peneliti.
- e. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian dan menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Objek Penelitian

Kecamatan Semarang Barat adalah pusat pemerintahan yang mempunyai ketinggian dataran 3 meter dari permukaan air laut dengan luas daerah keseluruhan 1.965.465 Ha yang terbagi dalam 16 kelurahan yaitu : Ngemplak Simongan, Bongsari, Kalibanteng Kulon, Kalibanteng Kidul, Gisik Drono, Bojong Salaman, Karang Ayu, Krobokan, Krapyak, Manyaran, Cabean, Tawang Mas, Tawang Sari, Tambak Harjo, Kebangarum, Salaman Mloyo.

Adapun jarak pusat pemerintahan wilayah Kecamatan dengan lingkungan sekitar yaitu:

- Kelurahan yang terjauh yaitu 5 km
- Kabupaten/Kota 4 km
- Ibu kota propinsi 6km

Berdasarkan data statistik Kecamatan Semarang Barat pada bulan Juni 2005, jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Barat berjumlah 154,604 orang. Dari jumlah tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu :

- Jenis laki-laki 76,757 orang
- Jenis perempuan 77,847 orang

Kec. Semarang Barat memiliki suhu maximum 33⁰C dan suhu minimum 21⁰C sedangkan curah hujan mencapai 63 mm/th dengan jumlah hari terbanyak 7 hari. Instansi tempat penelitian yang digunakan adalah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat. Kelompok UMKM Semarang Barat adalah kelompok usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang ada di wilayah Semarang Barat.

Deskripsi Responden

Berdasarkan 100 sampel yang diteliti, menunjukkan pengelola UMKM di Kecamatan Semarang Barat didominasi oleh Perempuan.

Tabel 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	38	38%
Perempuan	62	62%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa 66,67% responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan dan 38% berjenis kelamin laki-laki. Dari hasil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat di dominasi oleh pengelola bisnis perempuan.

Tingkat pendidikan dari pengelola UMKM di Kecamatan Semarang Barat lebih banyak didominasi oleh responden berpendidikan SMK, SMA dan SLTA. Berikut tabel disajikan deskripsi responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir seperti berikut:

Tabel 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
-	5	5%
SD	1	1%
SMP	12	12%
SMA/ SLTA	40	40%
SMK	22	22%
D1/D3	16	16%
S1	4	4%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden yang berpendidikan SMA/SLTA sebanyak 40%, kemudian diikuti responden yang berpendidikan SMK sebanyak 22%, kemudian responden yang berpendidikan D1/D3 sebanyak 16%, kemudian responden yang berpendidikan SMP sebanyak 12%, responden yang tidak bersekolah sebanyak 5%, responden yang berpendidikan S1 sebanyak 4% dan yang terakhir responden berpendidikan SD sebanyak 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat didominasi oleh responden yang berpendidikan SMA/SLTA.

Berdasarkan status usaha dari UMKM di Kecamatan Semarang Barat berstatus usaha belum berbadan hukum atau perorangan dengan kisaran omset rata-rata sebers Rp 1.714.000,-. Adapun aset yang dimiliki beragam, mulai dari gerobak, peralatan hingga bangunan tempat usaha.

Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian didapatkan dari proses pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner berguna untuk mendapatkan data dan kemudian akan diolah atau diproses, hasil jawaban responden tersebut selanjutnya di rekapitulasi dan dianalisis dengan analisis statistik persentase dengan rumus:

Rumus:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi / jumlah jawaban responden

N = Jumlah responden

Hasil analisis penelitian menunjukkan mayoritas UMKM dapat menerapkan tata kelola dengan baik. Tingkat penerapan tata kelola pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Tata Kelola UMKM

Skor	Kategori	Jml Responden	Persentase
>15	Sangat Baik	14	14%
14-15	Baik	62	62%
12-13	Buruk	24	24%
<12	Sangat Buruk	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 62% UMKM dapat menerapkan tata kelola dengan baik sedangkan 24% lainnya masih berada pada kategori buruk. Adapun mengenai tata kelola pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat berdasarkan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Tata Kelola UMKM Berdasarkan Indikator

No	Indikator Tata Kelola	Jumlah Berdasarkan Kategori							
		Sangat Baik		Baik		Buruk		Sangat Buruk	
		F	%	f	%	f	%	f	%
1	Transparansi	45	45%	47	47%	8	8%	0	0%
2	Akuntabilitas	94	94%	3	3%	3	3%	0	0%
3	Pertanggungjawaban	100	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Independensi	1	1%	78	78%	21	21%	0	0%
5	Kewajaran dan Kesetaraan	23	23%	77	77%	0	0%	0	0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 6 penerapan tata kelola pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang sudah melaksanakan pengelolaan usaha dengan baik terutama pada indikator pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Namun pada indikator transparansi dan independensi dari UMKM masih lemah.

Pada indikator transparansi menunjukkan 8% berada pada kategori buruk. Menurut Yuliasutik (2016) Penerapan transparansi pada UMKM diwujudkan dengan adanya kegiatan pencatatan keuangan serta adanya transparansi penggajian oleh pemilik UMKM. Pada penelitian ini, pemilik UMKM di Kecamatan Semarang Barat belum sepenuhnya menggunakan laporan keuangan dalam menjalankan usahanya dan pimpinan kurang dalam memberi penjelasan mengenai pola penggajian kepada karyawan. Banyak dari responden yang menyatakan dalam menyampaikan informasi baik keuangan dan non keuangan kepada investor atau kreditor juga belum atau sangat jarang dilakukan karena belum adanya laporan keuangan. Penyampaian pelaksanaan kegiatan kepada pemberi modal ataupun penjelasan mengenai pola penggajian atau pemberian honor pada para pegawainya juga tidak pernah dilakukan. Peraturan mengenai penggajian/pemberian honor biasanya dilakukan secara lisan, sehingga tidak dapat memberikan kejelasan pada masing-masing individu yang berkerja pada UMKM tersebut. Adanya transparansi dari sisi pemilik atau manajer akan berkontribusi positif pada seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan UKM (Suyono, 2017).

Pada indikator akuntabilitas, menunjukkan masih terdapat 3% yang berada pada kategori buruk. Akuntabilitas diperlukan dalam rangka meningkatkan keberlanjutan usaha (Jaswadi, 2016). Akuntabilitas UMKM di Kecamatan Semarang Barat masih berada pada kategori buruk karena belum melakukan pemisahan tugas dan tidak ada penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan. Terdapat UMKM yang melakukan perangkapan fungsi untuk tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Rincian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi pegawai juga tidak ada, karena sering sekali pimpinan perusahaan melakukan perubahan-perubahan peraturan/ketentuan terutama ketentuan atau peraturan tersebut tidak tertulis. Pengelola UMKM tidak memiliki prosedur operasi yang sudah distandarkan dengan baik dan tidak memiliki pedoman kerja yang telah dibakukan. Masalah-masalah tersebut membuat pelaksanaan tata kelola UMKM menjadi kurang baik.

Pada indikator pertanggungjawaban dapat diketahui semua UMKM di Kecamatan Semarang Barat (100%) berada pada kategori sangat baik. Pertanggungjawaban memberikan pengertian bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha (Yuliasutik, 2016). Pertanggungjawaban sangat dibutuhkan dalam hal

kepatuhan terhadap landasan hukum atau peraturan hukum yang berlaku untuk mengelola bisnis. Proses tersebut dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan yang telah dianggarkan, kepatuhan terhadap setiap perjanjian kesepakatan. Pemilik usaha sudah memiliki ijin legalitas pendirian usaha, menaati peraturan yang berlaku serta memperhatikan tanggung jawab kebersihan lingkungan di sekitar tempat usaha.

Pada indikator independensi terlihat sebanyak 21% berada pada kategori buruk. Menurut Yuliasutik (2016) penerapan independensi oleh UMKM meliputi bebas pengaruh dalam mengambil keputusan tentang pemilihan pemasok dan rekrutmen karyawan. Independensi juga dapat dipahami sebagai bentuk tidak adanya konflik kepentingan atau adanya pengaruh dari pihak-pihak yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan landasan hukum perusahaan. Adanya kemandirian untuk memilih pemasok atau distributor, penentuan tenaga kerja, serta penyusunan rencana kerja dan mengambil keputusan yang dilakukan manajer tanpa campur tangan oleh pemilik atau investor/kreditor. Pemilik/pengelola UMKM di Kecamatan Semarang Barat dalam mengambil keputusan masih terdapat campur tangan dari pihak lain seperti pemilik modal dan pengelola tidak melakukan pengambilan atas dasar kesepakatan bersama dengan karyawan lainnya.

Indikator kewajaran dan kesetaraan tidak terdapat responden dengan kategori buruk maupun sangat buruk, mayoritas berada kategori baik yaitu 77%. Kewajaran dan kesetaraan merupakan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (Daniri, 2005). Penjelasan untuk prinsip ini relevan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa perlakuan yang seimbang untuk memuaskan hak-hak bagi pemangku kepentingan haruslah sesuai serta patuh terhadap kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pengawasan oleh pemberi modal UMKM baik melalui pertemuan rutin atau forum diskusi yang diikuti oleh semua pemangku kepentingan. Ketidaksetaraan dapat dilihat dari perlakuan yang tidak sama, misalnya pemberian gaji/honor untuk karyawan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dan karyawan nonkeluarga, besarnya berbeda. Adapun pemilik atau pengelola UMKM di Kecamatan Semarang Barat sudah menunjukkan adanya kesetaraan yaitu dengan perlakuan yang sama pada saat pemilihan pegawai yang berasal dari keluarga atau luar keluarga serta pola pemberian gaji/honor diberlakukan sama. Adanya nilai kewajaran dalam UMKM menunjukkan kepedulian hak dan kewajiban pemilik UMKM terhadap keadilan yang didapat para stakeholder di UMKM (Yuliasutik, 2016).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan tata kelola pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis tingkat penerapan tata kelola dimana terdapat 62% UMKM dapat menerapkan tata kelola dengan baik sedangkan 24% lainnya masih berada pada kategori buruk. Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat menunjukkan banyak pelaku UMKM yang sudah melaksanakan pengelolaan usaha dengan baik terutama pada indikator pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Namun pada indikator transparansi dan independensi dari UMKM masih lemah. Pada indikator transparansi, pemilik UMKM di Kecamatan Semarang Barat belum sepenuhnya menggunakan laporan keuangan dalam menjalankan usahanya dan pimpinan kurang dalam memberi penjelasan mengenai pola penggajian kepada karyawan. Pada indikator independensi, pemilik/pengelola UMKM di Kecamatan Semarang Barat dalam mengambil keputusan masih terdapat campur tangan dari pihak lain seperti pemilik modal dan pengelola tidak melakukan pengambilan atas dasar kesepakatan bersama dengan karyawan lainnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diajukan dalam laporan ini yaitu bagi pelaku UMKM perlu untuk selalu menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk dalam menginformasikan setiap kegiatan UMKM. Agar dapat terus mempertahankan keberlanjutan usaha. Selain itu pemerintah perlu memiliki pedoman pelaksanaan tata kelola korporat, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memandu pelaksanaan tata kelola yang baik untuk UMKM khususnya di Kecamatan Semarang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, Mas Ahmad. 2005. *Good Corporat Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Hart, O. 1995. *Corporate Governance: Some Theory and Implications*. The Economic Journal, 105 (430), 678-689.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya> diakses pada tanggal 23 April 2021.
- Jaswadi. 2016. *Penerapan Good Governance pada Perusahaan Skala Kecil dan Menengah Non Go Public*. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 1 (3): 236–248.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kompas.com. 2019. Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>.
- Niode, I. Y. 2009. *Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOSNOMOS, 2 (1), 1-10.
- Nugraheni, Bernadetta Diana dan Cyrillius Martono. 2020. *Analisis Penerapan Tata Kelola Pada Kelompok Usaha Tekstil Kecil Dan Menengah Di Pekalongan*. Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO), Vol 12 (2): 54-67.
- Palupijati, S. dan Sivilokonom., N. I. 2013. *Tata Kelola pada UKM: Perbandingan Penerapan Pada Bisnis Keluarga dengan Bisnis Non Keluarga*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. <http://repository.ugm.ac.id/125670/>
- Putri, W. H. dan Bakhtiar, I. 2015. *Sistem Tata Kelola Keuangan Industri Kecil dan Pengrajin Kayu sebagai Upaya Penyehatan dan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Pengentasan Kemiskinan*. Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.
- Riesta Chahya Agustina dan Awan Santosa, 2019, *Pengaruh DAR, DER Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi*, Capital Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 3 Nomor 1.
- Shahab, M. A. 2012. *SME Governance and Staffs Empowerment on SMEs Performance in Semarang*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 17(2), 113-119.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, Eko. 2017. *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dalam Pengelolaan Usaha Kecil Dan Menengah: Sebuah Telaah Konseptual*. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang.
- Yuliastutik, Sinta. 2016. *Pengungkapan Penerapan Tata Kelola Korporat Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada UMKM Di Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya, Vol. 3 No. 2.
- Saputra, Juliadi dan Riche Fermayani. 2019. *Pengaruh Pemberdayaan Karyawan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Laboratorium Klinik Pramita Padang*. Jurnal Menara Ekonomi. Vol. 5 (1).

